

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menganut paham demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan kegiatan pada pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan daerah disusun dan disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara bertingkat terdiri atas Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat

(TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *good governance*. Untuk itu dibuatlah satu program sistem informasi akuntansi untuk mempermudah dan menyeragamkan laporan keuangan di pemerintah daerah ke pusat. Salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), sebagaimana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data, menyimpan data tentang aktivitas transaksi keuangan dan memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Yanti dan Musmini, 2020).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem untuk mengelompokkan, mencatat dan mengolah keuangan pemerintah dalam laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, informasi keuangan daerah dapat dikelola dan diakses secara cepat dan akurat.

Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi sehingga dapat memenuhi fungsinya, yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem informasi akuntansi yang layak dapat menghasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambilan keputusan. Menurut (Azhar Susanto, 2017:80), Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Pada umumnya, pemanfaatan sistem informasi akuntansi lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tinggi

tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan (Rama dan Jones, 2008:5). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Sejak tahun 2018 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (Muhammad Utama, 2012) Beberapa rekomendasi dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah terkait masih minimnya opini WTP yang disematkan BPK RI kepada 539 pemda baik itu kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia agar memperoleh opini WTP yaitu dengan memperhatikan laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penjelasan atau pengungkapannya cukup, dan dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern yang ada, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil *review* atas LKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, sehingga LKPD yang telah ditinjau berkualitas dan pada akhirnya tidak banyak kesalahan apabila diaudit oleh BPK, dan yang paling berperan penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi.

Identifikasi atas faktor-faktor yang potensial menyebabkan laporan keuangan menjadi belum (kurang) berkualitas merupakan langkah penting

untuk selanjutnya melakukan berbagai penyempurnaan di masa mendatang. Ariefsetya (2018) dalam penelitiannya pada 4 kabupaten dan 1 kota pada Daerah Istimewa Yogyakarta mengidentifikasi sedikitnya ada 3 faktor yang dipertimbangkan signifikan dalam mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sementara Ikgang Murapi (2016) dalam penelitiannya mengidentifikasi 4 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Pada intinya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, dan selain melakukan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pengauditan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sangat dibutuhkan juga agar dapat memberi jaminan dari opini yang diberikan, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Flores Timur TA 2018-2019**

| Entitas                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Kabupaten Flores Timur | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  |

*Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur.*

Opini wajar dengan pengecualian yang diberikan oleh BPK pada periode 2018-2020 didasari atas temuan berulang signifikan terkait kelemahan pengendalian intern atas penatausahaan dan penyajian, yaitu belum dicatatnya beberapa aset, dan pengakumulasian nilai penyusutan aset tetap yang dinilai tidak wajar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang aset tetap tanah, peralatan dan mesin dan beban penyusutan, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut di atas.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 1 Tahun 2017 Tentang standar pemeriksaan keuangan negara menunjukkan bahwa pelaporan keuangan disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku tentunya tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memanfaatkan penggunaan sistem informasi akuntansi. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait masi diberikannya catatan oleh BPK di dalam LHP pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut (BPK Perwakilan Provinsi NTT, 2021) terkait adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai yang pensiun, diberhentikan dan tugas belajar, investasi jangka Panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum jelas status penyelesaiannya,

penatausahaan aset tetap pada Pemkab Flores Timur yang belum tertib, dan penyelesaian atas utang jangka pendek lainnya belum optimal.

Uraian masalah di atas menunjukkan bahwa Pemkab Flores Timur belum sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan dikarenakan masih adanya catatan yang diberikan oleh BPK. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi pada Pemkab Flores Timur. Menurut analisis yang dilakukan oleh Silvia dan Anthoni (2014) pada kualitas laporan keuangan pemda kabupaten di Jawa Barat, salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chairina dan Wehartaty, 2019) yang menjelaskan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKPD Kota Surabaya.

Berdasarkan Pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan judul: **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu; “Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dengan penggunaan aplikasi SIPD berdasarkan Permendagri No 70 tahun 2019 dan Permendagri No 77 tahun 2020?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dengan penggunaan aplikasi SIPD berdasarkan Permendagri No 70 tahun 2019 dan Permendagri No 77 tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur**

Untuk membantu memperbaiki apabila terdapat kelemahan-kelemahan dalam lingkungan kerja pemerintahan terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **2. Bagi Peneliti**

Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, serta sebagai bahan pertimbangan antara ilmu yang dipelajari dalam teori dengan praktik yang ada dilingkungan organisasi.

### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam baik teoritis maupun empiris mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah, serta sebagai referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti di masa yang akan datang.